

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jln. Ir. Juanda Telp. (0275) 321070, Fax :(0275)325451
Purworejo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini merupakan salah satu tolok ukur untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan pembangunan di bidang Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi.

Purworejo, Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



[Handwritten Signature]
Ir. MADI PRANOTO
Pembina

NIP. 19671007 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Ir. Juanda Purworejo Kode Pos 54112
Telp. (0275) 321070 Fax. (0275) 325451

E- mail: dinperinaker@purworejokab.go.id Website: dinperinaker@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 050 / /2022

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang direncanakan Tahun 2022 perlu ditetapkan target kinerja;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Perangkat Daerah menyusun dokumen RKT paling lambat satu minggu setelah menerima DPA ditetapkan;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 dan DPA Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo perlu disusun RKT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110).;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Nomor DPA/A.1/3.31.3.32.2.07.11.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022.
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Landasan dan Pedoman Operasional bagi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2022

- KETIGA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
BAB III : Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
BAB IV : Penutup
- KEEMPAT : Naskah Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO




Ir. HADI PRANOTO
Pembina
NIP. 19671007 199803 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tahun 2022 direncanakan melaksanakan beberapa urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan, yang terangkum sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Non Urusan	1	7	30	7.288.781.821
2	Urusan Tenaga Kerja	4	10	12	2.380.481.536
3	Urusan Perindustrian	3	3	6	6.301.829.400
4	Urusan Transmigrasi	1	1	2	141.577.400
5	Pendapatan	-	-		4.860.000
Jumlah Pendapatan					4.860.000
Total Jumlah belanja					16.112.670.157

Pada tahun 2022 masih banyak hal yang harus dilaksanakan dalam rangka memberdayakan industri kecil, industri menengah agar dapat bersaing dengan industri daerah lain, bertambahnya pencari kerja, dan terbatasnya lowongan kerja, serta terbatasnya quota transmigran untuk dapat diberangkatkan bertransmigrasi.

Pada sisi lain, semakin menurunnya jumlah pegawai tanpa diiringi penambahan (rekrutment) menjadikan tugas dan tanggung jawab dinas terasa kian berat. Oleh karena itu kami berharap ada keterpaduan antar Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui lintas Perangkat Daerah lain dalam rangka menyelesaikan masalah Perindustrian, ketenagakerjaan, dan masalah transmigrasi.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat untuk menjadikan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan.

Purworejo, Januari 2022

KETALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO




I. HADI PRANOTO
Pembina

NP 19671007 199803 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
Keputusan Kepala Dinas.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan	1
B. Dasar hukum	1
C. Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja	2
D. Kondisi Aktual.....	5
E. SWOT Tahun 2022	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	8
A. Tujuan.....	8
B. Sasaran	9
C. Indikator Tujuan dan Sasaran	9
BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	11
A. Program.....	11
B. Kegiatan dan Sub kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan amanah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah (PD) dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan tahunan. Dengan disusunnya RKT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini diharapkan penyelenggaraan program dan kegiatan lebih terencana dan terarah dalam rangka menyelesaikan isu-isu perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

B. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
- f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;

- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Nomor DPA/A.1/3.31.3.32.2.07.11.0000/001/ 2022 tanggal 3 Januari 2022

C. Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

Adapun tugas Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Transmigrasi, Tenaga Kerja serta Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

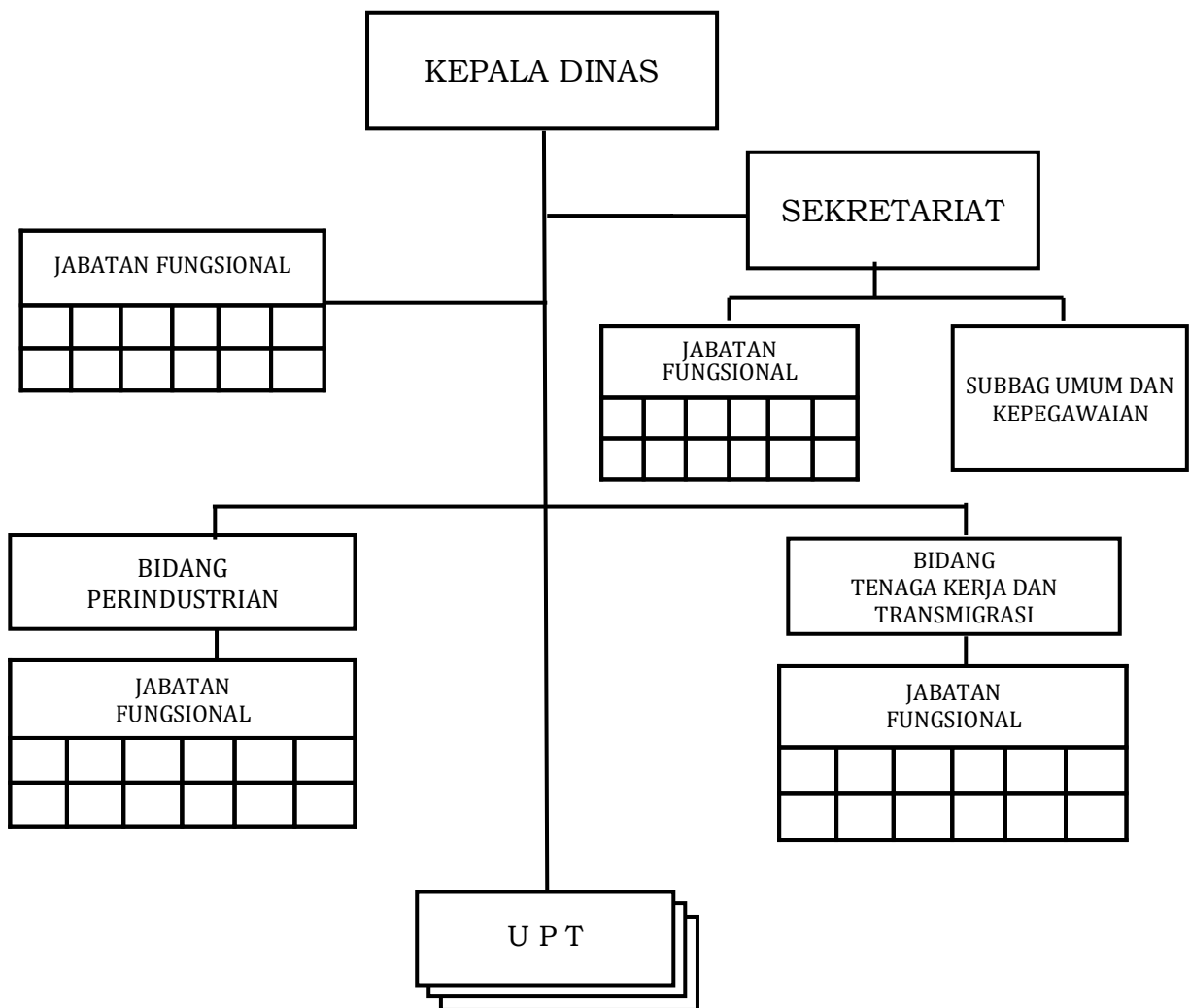
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. UPT; dan
- f. Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo



D. Kondisi Aktual

Tahun 2022 beberapa isu aktual telah berpengaruh pada arah kebijakan pemerintah daerah. Berbagai langkah ditempuh untuk menjawab isu-isu yang erat berkaitan dengan urusan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Isu-isu strategis tersebut adalah (1) pindahnya Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo yang sudah beroperasi untuk semua penerbangan sipil baik dalam maupun luar negeri (2) Rencana Bedah Menoreh yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan Bandara dengan Kawasan Strategis Borobudur, (3) pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cilacap-Yogyakarta dan (4) Pembangunan Bendungan di Kecamatan Bener yang pembangunannya sudah dimulai tahun 2020.

Keempat isu di atas akan sangat berpengaruh khususnya terhadap masalah perindustrian dan ketenagakerjaan, baik dari sisi suplay dan demand maupun hubungan industrialnya. Dampak berikutnya, akan tumbuh sektor industri kecil dan menengah yang perlu diantisipasi penataan, regulasi dan perlindungannya.

Dalam rangka menyambut isu aktual tersebut kami siapkan langkah-langkah preventif seperti peningkatan ketrampilan kerja, perluasan dan penempatan kerja serta langkah-langkah preventif bidang hubungan industrial.

Selain prediksi terbukanya lowongan kerja, isu-isu aktual tersebut akan berdampak tumbuhnya industri kecil dan menengah yang harus pula diantisipasi untuk langkah-langkah pembinaan dan pemberdayaan. Terhadap kondisi ini, telah disiapkan pelatihan dan pengembangan industri kecil serta penyusunan regulasi bidang industri.

E. SWOT Tahun 2022

SWOT adalah salah satu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu kegiatan.

Analisis SWOT menggambarkan bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan/tujuan dari peluang (opportunities) yang ada dan bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness), yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan, dari peluang (opportunities) yang ada.

Selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman (threats) dan akhirnya bagaimana cara mengatasi kelemahan agar peluang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Kekuatan dan kelemahan identik dengan lingkungan internal sedangkan peluang dan ancaman identik dengan faktor eksternal. Keempat komponen tersebut diatas diklasifikasikan sebagai berikut:

- I. Kekuatan (strengths)
 - Visi misi Bupati yang jelas sebagai pedoman dasar dalam menyusun program dari kegiatan
 - Kewenangan menangani urusan Perindustrian, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian memiliki dasar hukum
 - Dukungan pemerintah yang kondusif dari pusat dan daerah
 - Memiliki UPT BLK sebagai pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan ketrampilan pencari kerja agar dapat terserap di pasar kerja
 - Tersedianya pegawai fungsional yang spesifik memiliki keahlian dalam mendukung tugas dan fungsi dinas
 - Terjalannya hubungan harmonis dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- II. Kelemahan (weaknesses)
 - Sarana prasarana terbatas terutama kendaraan operasional dan peralatan pelatihan
 - Urusan perindustrian, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian belum menjadi program prioritas pemerintah daerah
 - Semakin menurunnya jumlah pegawai karena pensiun sementara tidak ada regenerasi pegawai
 - Jumlah PNS terbatas padahal pada urusan tertentu harus diisi oleh PNS
- III. Peluang (opportunities)
 - Ada peran serta dari masyarakat/lembaga/dunia usaha dalam menanggulangi permasalahan urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi
 - Animo transmigrasi relatif tinggi, membuka kesempatan program dan kegiatan ketrasmigrasian dapat berlangsung lancar.
 - Angka pencari kerja relatif masih tinggi memberi peluang permintaan tenaga kerja terpenuhi

IV. Ancaman (threats)

- Ketrampilan/skill pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja
- Banyak pencari kerja yang enggan bekerja diluar daerah dan cenderung memilih jenis pekerjaan
- Perlindungan tenaga kerja di perusahaan belum optimal
- Masih terdapat perusahaan yang belum melaksanakan peraturan perundangan
- Kuota transmigrasi relatif kecil dibanding animo masyarakat

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Untuk mencapai visi perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka perwujudan visi. Misi merupakan sebuah komitmen bersama yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan guna mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam **“Panca Daya Saing”** dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan **daya saing sumber daya manusia** yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- 2) Meningkatkan **daya saing sektor pertanian** dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.
- 3) Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- 4) Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
- 5) Meningkatkan **daya saing sarana prasarana dan infrastruktur** yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Guna mencapai Visi Kepala Daerah Terpilih, Misi yang relevan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tercantum pada misi ke I (satu) , misi ke III (tiga) dan ke IV (empat).

Pada misi ke I (satu) terdapat tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas adalah **Pengurangan tingkat pengangguran** yang keberhasilannya diukur dengan indikator *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *meningkatnya partisipasi angkatan kerja* yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Misi ke III (tiga) memiliki tujuan **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka *Pertumbuhan Ekonomi* (PE) dan didukung sasaran *Meningkatnya PDRB Per Kapita* yang diukur melalui indikator PDRB per kapita.

Pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi dari berbagai sektor, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka PDRB yang dimaksud adalah *Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan*.

Misi ke IV (empat) memiliki tujuan untuk **mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia** yang diukur keberhasilannya melalui indikator *Indeks Reformasi Birokrasi* (IRB) dan didukung sasaran *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator *Indeks Pelayanan Publik*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan misi yang mempunyai keterkaitan dengan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja maka ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran.

Berdasarkan misi yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka ditetapkan Tujuan Perangkat Daerah yaitu:

1. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja (mendukung misi I);
2. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan (mendukung Misi III);
3. Peningkatan Pelayanan Publik (mendukung Misi IV).

B. SASARAN

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pengertian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka ditentukan sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja. (mendukung Tujuan 1);
2. Transmigran Menetap (mendukung Tujuan I);
3. Meningkatnya Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan (mendukung Tujuan 2);
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (mendukung Tujuan 3);

C. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

Indikator adalah variable yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Tujuan dari penetapan Indikator yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran beserta Target Kinerja Tahun 2022 Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran serta Indikator
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2022

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan partisipasi angkatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).	73,64 %
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,45%
		Transmigran menetap	Persentase transmigran yang menetap	100 %
2.	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan		Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	5,24 %
		Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	18,49 %
3.	Peningkatan Pelayanan Publik		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,00

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. PROGRAM

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.

Perumusan prioritas program yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Selain itu dalam penyusunan program, juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 melaksanakan 9 (sembilan) program. Adapun kesembilan Program tersebut beserta indikator kinerja beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Program, Indikator dan Target
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2022

NO.	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya	7,54 %
2	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase perizinan industri kewenangan Kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan	15,00 %
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;	Tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri	62,86 %
4	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang disusun	100 %
5	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang memiliki Kompetensi	88,00 %
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	1,56 %
6	Penempatan Tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	26,47 %
7	Hubungan Industrial	Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja	46,56 %
8	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100 %
9	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 %

B. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mendukung Program maka dijabarkan dalam bentuk kegiatan, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Seperti halnya dalam penyusunan program, maka dalam penyusunan Kegiatan dan Sub kegiatan juga harus memperhatikan target yang telah ditetapkan untuk mendukung Program seperti tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Dengan memperhatikan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mencapai program tersebut, maka Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 melaksanakan Kegiatan sebanyak 19 Kegiatan yang didukung dengan 49 Sub Kegiatan. Adapaun Kegiatan dan Sub kegiatan dimaksud beserta target kinerjanya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

**Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator serta Target
Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Tahun 2022**

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Industri Kabupaten	120 IKM
	1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen RPIK	1 dokumen
	2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di dalam Negeri	50 IKM
		Pengembangan Industri	70 IKM
	3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Sentra IKM	1 sentra
		Studi kelayakan lokasi KIHT	1 dokumen
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kelancaran pengadministrasian dan pemenuhan komitmen izin usaha Industri	20 IKM
	4) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tertib kepemilikan perizinan	20 IKM

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
3	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data industri yang mutakhir dan terpublikasi	100%
	5) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data industri	1 dokumen
	6) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Hasil pemantauan dan evaluasi pelaporan data ke SIINAS	1 dokumen
4	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rencana Tenaga Kerja	1 dokumen
	7) Penyusunan Rencana Tenaga kerja Makro	Dokumen RTKD	1 dokumen
5	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai latihan Kerja	64%
	8) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Bisnis Manajemen.	32 orang
		Pelatihan Bordir	16 orang
		Pelatihan Las	32 orang
		Pelatihan listrik	32 orang
		Pelatihan Menjahit	32 orang
		Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	112 orang
		Pelatihan Sepeda motor	32 orang
		Pelatihan TIK	48 orang
		Pelatihan Satpam	16 orang
		Pelatihan Stir Mobil	16 orang
	9) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pencari kerja	1 paket
6	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terbina	100%
	10) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS yang dibina	36 LPKS
7	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang diberikan konsultasi produktivitas	10 perusahaan
	11) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas	10 perusahaan
8	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	12) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen
9	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%
	13) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Penyusunan Perda Ketenagakerjaan	1 Perda
		Tersedianya Sumber daya pelayanan antarkerja	12 bulan
	14) Pelayanan antar Kerja	Dokumen Informasi Pasar Kerja	12 dokumen
		Terlaksananya pelayanan antarkerja	12 bulan
10	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	100%
	15) Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan Job Fair	1 kali
11	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan pelatihan/ pemberdayaan	7,5%
	16) Peningkatan Pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sosialisasi Perlindungan CPMI	30 orang
12	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	47,47%
	17) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan memiliki dan melaksanakan pembuatan Peraturan Perusahaan	5 perusahaan
13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja	100%
	18) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dialog Ketenagakerjaan	5 kali
		Rekomendasi UMK	1 dokumen
		Sosialisasi UMK	1 kali
14	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan transmigran	100%
	19) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Antar Daerah	1 KSAD
	20) Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi transmigrasi	1 kali
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah	28 dokumen

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	21 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen
	22) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
	23) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
	24) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
	25) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
	26) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
	27) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Data dasar Pembangunan Perangkat Daerah	5 dokumen
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase layanan Administrasi keuangan Perangkat daerah	100%
	28) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan
	29) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan
	30) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan
	31) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan
	32) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi anggaran	1 dokumen
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	33) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%
	34) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
	35) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan penyediaan Peralatan rumah tangga	12 bulan
	36) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan logistic kantor	12 bulan
	37) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
	38) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
	39) Penyediaan Bahan/Material	Layanan penyediaan bahan/material	12 bulan
	40) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
	41) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan penyelenggaraan rapat- koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan
	42) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan	8 jenis
	43) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	27 unit
20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten	100%
	44) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan
	45) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
21	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang milik daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	19 jenis
	46) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit
	47) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	129 unit
	48) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit
	49) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	24 unit

Untuk lebih jelasnya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran beserta Target kinerjanya, serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan disertai Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Pagu anggarannya tertuang dalam bentuk table Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran Dokumen ini.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan suatu Dokumen Rencana Kinerja Tahunan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Rencana Kinerja Tahunan dapat mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memiliki keberhasilan dan atau kegagalan Perangkat Daerah.

Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahunan 2022 yang telah disusun dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan Tahun 2022 dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan, disamping itu juga dapat dipakai sebagai tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja kegiatan yang selanjutnya sebagai perwujudan akuntabilitas kepada publik.

Purworejo, Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO



HADI PRANOTO
Pembina
NP. 19671007 199803 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan	18,49 %	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan produktivitas IKM tiap tahunnya	7,54 %	6.227.036.000	
				Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Industri Kabupaten	120 IKM	6.227.036.000	
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen RPIK	1 dokumen	103.313.000	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di dalam Negeri	50 IKM	365.055.700	
					Pengembangan Industri	70 IKM		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Kemampuan Sentra IKM	1 sentra	5.758.667.300	
					Studi kelayakan lokasi KIHT	1 dokumen		
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Perizinan Industri kewenangan kabupaten yang memenuhi komitmen perizinan	15%	17.292.400	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kelancaran pengadministrasian dan pemenuhan komitmen izin usaha Industri	20 IKM	17.292.400	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Tertib Kepemilikan Perizinan	20 IKM	17.292.400	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	62,86%	57.501.000	
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Industri yang Mutakhir dan Terpublikasi	100%	57.501.000	
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data industri	1 dokumen	32.882.000	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Hasil pemantauan dan evaluasi pelaporan data ke SIINAS	1 dokumen	24.619.000	
2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,45%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	100%	82.754.400	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Rencaana Tenaga Kerja	1 Dokumen	82.754.400	
				Penyusunan Rencana Tenaga kerja Makro	Dokumen RTKD	1 Dokumen	82.754.400	
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	88%	1.845.893.200	
					Persentase Peningkatan Produktivitas tenaga Kerja	1,56%		
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan pelatihan Balai Latihan Kerja	64%	1.783.925.500	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Bisnis Manajemen	32 orang	1.226.652.700	
					Pelatihan Bordir	16 orang		
					Pelatihan Las	32 orang		
					Pelatihan Listrik	32 orang		

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Pelatihan Menjahit	32 orang		
					Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	112 orang		
					Pelatihan Sepeda Motor	32 orang		
					Pelatihan TIK	48 orang		
					Pelatihan Satpam	16 orang		
					Pelatihan Stir Mobil	16 orang		
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	1 paket	557.272.800	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang Terbina	100%	16.991.600	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPKS yang dibina	36 LPKS	16.991.600	
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang diberikan Konsultasi Produktivitas	10 perusahaan	19.976.100	
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas	10 perusahaan	19.976.100	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen	25.000.000	
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	1 dokumen	25.000.000	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	26,47 %	274.454.736	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	144.775.736	
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Penyusunan Perda Ketenagakerjaan	1 Perda	118.609.936	
					Tersediannya Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	12 bulan		
				Pelayanan antar Kerja	Dokumen Informasi Pasar Kerja	12 Dokumen	26.165.800	
					Terlaksananya Pelayanan Antar kerja	12 bulan		
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja	100%	118.679.000	
				Job Fair/Bursa Kerja	Pelaksanaan Job Fair	1 kali	118.679.000	
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase CPMI/PMI yang mendapatkan pelatihan /pemberdayaan	7,5%	11.000.000	
				Peningkatan Pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sosialisasi Perlindungan CPMI	30 orang	11.000.000	
				Program Hubungan Industrial	Persentase sarana hubungan industrial dan syarat kerja	46.56 %	177.379.200	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PP dan PKB yang disahkan dan di daftarkan	47.47 %	6.905.000	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Perusahaan memiliki dan melaksanakan pembuatan Peraturan Perusahaan	5 perusahaan	6.905.000	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan dan kesejahteraan pekerja	100%	170.474.200	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dialog Ketenagakerjaan	5 kali	170.474.200	
					Rekomendasi UMK	1 dokumen		
					Sosialisasi UMK	1 kali		
3	Transmigran menetap	Persentase transmigran yang menetap	100 %	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi	100%	141.577.400	
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan transmigran	100%	141.577.400	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerjasama Antar Daerah	1 KSAD	74.462.400	
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi transmigrasi	1 kali	67.115.000	

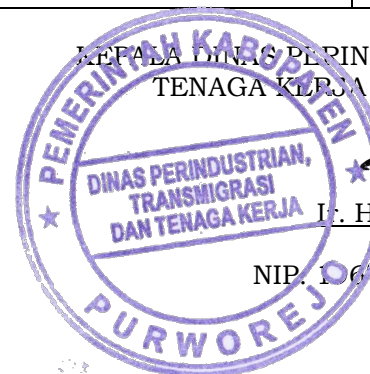
NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	7.288.781.821	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen	44.599.600	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	17.036.700	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.046.600	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.046.600	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.728.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.728.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	6.456.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	13.557.700	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.726.295.985	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	5.689.474.285	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	24.475.600	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.736.400	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	8.378.100	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.231.600	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	24.860.000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 orang	24.860.000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	374.625.860	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	19.916.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	27.451.800	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	78.724.800	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	37.788.200	
				Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3.624.000	
				Penyediaan Bahan/Material	Layanan Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	89.557.560	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	6.158.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	108.004.000	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	3.401.500	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan	8 Jenis	280.554.000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	27 unit	280.554.000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	12 bulan	528.752.376	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	209.220.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	319.532.376	

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	19 Jenis	309.094.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 unit	57.356.000	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 unit	93.583.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	125.700.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 unit	32.455.000	

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO



[Signature]
I. HADI PRANOTO
Pembina

NIP. 16671007 199803 1 003

